

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustina, Shinta dkk., 2015, *Obstruction of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2005, *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Fariz, Donal dkk., 2014, *Kajian Implementasi Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta.

Greenberg, Theodore dkk., 2009, *Stolen Asset Recovery : A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank, Washington D.C.

Hasan, Iskandar dan Nina Naramurti, 2013, *Kerja Sama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*, PT Firris Bahtera Perkasa, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.

Kaligis, O.C., 2015, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan*, PT Alumni, Bandung.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi : Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Lindsey, Timothy dan Howard Dick, 2002, *Corruption in Asia : Rethinking the Governance Paradigm*, Federation Press, USA.

Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Thohary, Wahyudi dkk, 2015, *Survei Persepsi Korupsi 2015, Transparency International Indonesia*, Jakarta.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Gap Analysis Study Report : Identification of Gaps between Laws/Regulation of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

UNODC, 2004, *United Nations Handbook on Practical Anti-Corruption Measures for Prosecutors and Investigators*, United Nations Publication, New York.

-----, 2006, *Legislative Guide for The Implementation of The United Nations Convention against Corruption*, United Nations Publication, Wina.

-----, 2009, *Technical Guide to The UNCAC*, United Nations Publication, New York.

-----, 2010, *Travaux Preparatoires of The Negotiation for The Elaboration of The UNCAC*, United Nations Publication, New York.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Makalah

Diansyah, Febri, dkk., “*Independent Report : Corruption Assesment and Compliance of UNCAC 2003 in Indonesian Law*”, 2nd Conference of State Party (CoSP) of UNCAC, Nusa Dua, 28 Januari-1 Februari 2008.

Artikel Jurnal

Arrsa, Ria Casmi, “Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.3, No.3, Desember 2014.

PERC Ltd., “*Annual Review of Corruption in Asia – 2015*”, *Asian Intelligence*”, No. 920, April 2015.

Situmorang, Mosgan, “Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan *United Nations Against Corruption*”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 3, Desember 2014.

Suharyo, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi dalam Era Desentralisasi di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.3, No.3, Desember 2014.

Majalah

Yuntho, Emerson, “Penyidik Independen KPK”, *Republika*, 26 Mei 2010.

Internet

Kabibi, Ikhwanul, “Kasus *Innospec* Bukti Kerja Sama KPK dengan Penegak Hukum Internasional”, *Detik News*, <http://news.detik.com/berita/3058156/kasus-innospec-bukti-kerja-sama-kpk-dengan-penegak-hukum-internasional>, 15 Januari 2016.

Qorib, Fathan, “Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia”, *Hukum Online*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4daeb43d3eee3/rapor-biru-implementasi-uncac-indonesia>, 14 Desember 2015.

United Nations, “*United Nations Treaty Collection Chapter XVIII*”, *United Nations Treaty Series*,
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii14&chapter=18, 21 Oktober 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1192 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3948).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.